

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT¹

(Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)

Oleh : Mikhael Wurangian²

ABSTRAK

Sebagai negara agraris, Indonesia menempatkan sektor pertanian sebagai penyangga bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, mengingat semakin terus bertambahnya kebutuhan akan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan penting kiranya membicarakan cara efektif dalam memberdayakan masyarakat petani. Pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa sektor pertanian adalah sektor kebutuhan yang paling vital bagi masyarakat. Kian hari jumlah masyarakat yang masih memilih untuk bertani semakin sedikit. Masyarakat saat ini lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan dan di instansi-instansi pemerintah serta swasta lainnya. Sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan lagi. Strategi pemerintah yang tepat sangat diperlukan untuk kemajuan desa.

Konsep yang dipakai untuk membedah strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Andrew (2005) yang mengatakan strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation).

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah desa dalam pemberdayana masyarakat di desa Basaan I terutama di bagian pertanian, karena pertanian merupakan sumber mata pencaharian kebanyakan masyarakat, dengan majunya sector pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan bertambah juga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rangka mendukung selesainya penelitian ini.

Keywords : Strategi, Pemberdayaan, Pertanian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendorong kesadaran akan pentingnya peran sektor pertanian dalam menyangga pembangunan, masyarakat juga perlu didorong untuk menciptakan dan menjalankan pola pertanian produktif yang padat karya. Selama ini salah satu penyebab semakin berkurangnya minat masyarakat menjadi petani adalah dikarenakan rasio antara kerja dan penghasilan yang mereka peroleh tidakimbang. Para petani mendapat laba yang sedikit dari usaha mereka menggarap lahan pertanian. Hal ini disebabkan antara lain oleh, mahalnnya bibit, mahalnnya pupuk dan obat-obatan kimia, dan mahalnnya peralatan pertanian yang harus dibeli petani. Biaya yang sangat tinggi yang

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

harus dikeluarkan petani menjadi persoalan pelik yang menyebabkan masyarakat menganggap berprofesi sebagai petani sama sekali tidak menguntungkan.

Untuk itu perlu adanya peran pemerintah melalui strategi pemberdayaan bagi masyarakat petani, agar nantinya petani dapat membuat bibit, pupuk, peralatan pertanian yang murah dan mencari obat-obatan alternatif sebagai pengganti bagi obat-obatan kimia yang berdampak negatif bagi tanaman pertanian, disamping harganya yang mahal.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran lainnya. Mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan memproduksi bibit lokal dan menjualnya kepada para petani dengan harga yang terjangkau. Sebagian lainnya bisa memproduksi pupuk kompos, sebagian masyarakat lainnya bisa memproduksi alat-alat pertanian alternatif yang murah dan efisien, dan menemukan obat-obatan alternatif non kimiawi untuk pertanian. Masyarakat dalam hal ini bisa diberdayakan dengan memberikan pengetahuan dan skill dan pendampingan dalam memproduksi hal-hal tersebut diatas. Pengetahuan dan skill dan pendampingan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan intensif yang tidak dipungut biaya. Maka dalam proses pemberdayaan ini diperlukan sinergi kelompok-kelompok seperti sekolah Menengah dan sekolah tinggi pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Koperasi Unit Desa dan Pemerintah Desaserta Dinas terkait. Lembaga-lembaga ini yang mempunyai banyak pengetahuan dan skill dibidang pertanian dapat memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pertanian. Sedang Koperasi Unit Desa dapat menjadi penyalur bagi bahan, alat dan hasil-hasil pertanian tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat melakukan fungsi advokasi serupa dalam memperjuangkan land reform dan mengontrol harga pasar, serta melakukan advokasi dari gencar masuknya produk-produk kimia untuk pertanian. Koperasi Unit Desa bisa menjalankan sistem perdagangan yang berorientasi pada pengutamakan kepentingan petani dalam hal distribusi dan harga. Sedangkan sekolah-sekolah pertanian bisa juga melakukan advokasi juga terhadap masuknya produk-produk kimiawi pertanian. Tanpa advokasi maka tindakan pemberdayaan tidak berarti apa-apa dalam memperjuangkan para petani. Tindakan yang tidak komprehensif dan masif ini sama saja dengan usaha menegakkan benang basah dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Kecenderungan masyarakat petani adalah masyarakat yang kurang memiliki kemandirian penuh sehingga perlu adanya pemberdayaan bagi masyarakat itu sendiri, maka dengan alasan yang sama pula penting bagi kita untuk melakukan fungsi advokasi bagi para petani.

Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat petani ini, pemerintah perlu mencari suatu strategi pemberdayaan yang tepat, seperti yang diketahui bahwa arti dari strategi itu adalah: Strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi) (Andrew, 2005:19).

Melalui tahap perumusan ini, pemerintah desa diharapkan mampu menganalisa keputusan-keputusan kondisional yang ada untuk ditetapkan menjadi sebuah tindakan yang harus dijalankan seperti: kondisi lahan pertanian yang ada di desa Basa yang terbilang cukup subur tapi sangat memerlukan air, oleh karena itu perlu adanya upaya irigasi/pengairan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, penggunaan bibit unggul yang belum sepenuhnya dilakukan oleh para petani, pemakaian pupuk yang masih sangat bergantung kepada pupuk non organik, yang dipasarkan dengan harga yang lumayan mahal, waktu menanam dan waktu memanen yang tidak secara bersamaan. Dari observasi awal terlihat strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat petani yaitu : menyediakan lahan seluas 156. 990 ha dan 190.428 ha untuk

masyarakat diusahakan dengan catatan 1 keluarga 1 hektar tanah. Masalah-masalah yang teridentifikasi diatas, memerlukan strategi tersendiri bagi pemerintah desa melalui langkah-langkah pemberdayaan bagi masyarakat petani, agar masyarakat petani di desa basaan dapat mandiri, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga dalam melakukan aktifitasnya, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Basaan Kecamatan Ratatotok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Basaan Kecamatan Ratatotok, melalui tahapan strategi: tahap perumusan, tahap pemutusan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang strategi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Basaan, khususnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat petani.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin lebih njauh lagi mengkaji mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Menurut Andrew (2005), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi).

Menurut Andrew (2005:19) strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation) (Andrew, 2005: 25).

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

a. Tahap perumusan.

Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

b. Tahap pemutusan.

Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.

c. Tahap pelaksanaan.

Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.

d. Tahap penilaian.

Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mensejahterakan masing-masing individu.

2. Indikator Pemberdayaan

Pemberdayaan mencakup dua (2) dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif. Dimensi tersebut menirukan pada:

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

3. Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dengan klien dalam setting pertolongan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri berkemampuan diri. Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang telah melekat agar rakyat berkemampuan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Melalui peran tersebut diharapkan muncul kesadaran dari perorangan dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat untuk meneladaninya. Pemberdayaan sebagai upaya untuk menggerakkan roda ekonomi. Konsep pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan merupakan jawaban atas realita ketidakberdayaan (disempowerment). Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan mempunyai beberapa aspek yaitu:

1. Dapat memberikan kemampuan secara dasar sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi kelompok-kelompok masyarakat.
2. Karena adanya upaya pembangunan yang akan memberikan suatu kapasitas dan dapat menggerakkan berlangsungnya roda perekonomian.
3. Dengan adanya upaya pemberdayaan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan.
4. Dengan adanya proses perubahan sosial, maka dapat memberikan pengaruh yang lebih besar memungkinkan orang-orang baik secara lokal maupun nasional.
5. Dengan adanya pemberdayaan maka dapat memberi kekuatan kepada masyarakat lemah.

4. Tahap-Tahap pemberdayaan

Ada beberapa tahap pemberdayaan yang menerapkan tidak selalu linier dan kalau melainkan lebih fleksibel. Fase kegiatan ini meliputi:

1. Persiapan.
2. Pengembangan kontak dengan klien.
3. Pengumpulan data.
4. Perencanaan dan analisis.
5. Bekerja dengan kelompok komunitas.

6. Penayadaran diri bersama untuk perubahan yang ingin dicapai.
7. Monitoring dan evaluasi.
8. Kesepakatan bersama.

5. Proses-Proses Pemberdayaan

United Nations (1956:83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa/kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artimya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *custom*, jenis pengelompokkan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3. *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4. *Stimulating the community to realize that it has problems*

Didalam masyarakat yang terkait terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5. *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6. *Helping people to identify their most pressing problems*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

C. Konsep Desa

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni desa, dusun yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1993:200), disebut bahwa desa adalah:

1. Kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, atau dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
3. Tempat, tanah dan daerah.

Inayahullah (Ibrahim 2003:182) mengemukakan bahwa desa suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri, desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja.

Roucek (Ibrahim, 2003:182) mendefinisikan desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduknya dengan lembaga mereka diwilayah setempat dimana mereka tinggal, yaitu diladang-ladang, berserak dan dikampung biasanya menjadi pusat segala aktivitas mereka bersama.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002: 35).

Metode deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk menganalisa masalah-masalah yang mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan “Metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi, penelitian dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional” (Nazir, 2005:139).

B. Fokus Penelitian

Untuk menfokuskan penelitian ini penulis memberikan batasan konsep yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Strategi adalah suatu langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah desa dalam proses pemberdayaan, yaitu (Andrew, 2005:19):
 - a. Tahap perumusan.
Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
 - b. Tahap pemutusan.
Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
 - c. Tahap pelaksanaan.
Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.
 - d. Tahap penilaian.
Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya
2. Pemberdayaan adalah kemampuan, kemandirian, kekuatan, dan tenaga yang dimiliki oleh petani dalam melakukan aktifitas usaha dibidang pertanian.

Serta hal-hal lain yang akan berkembang saat penelitian ini dilaksanakan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistemik. Kalau pengamatan dilakukan dengan sambil lalu dan tidak memenuhi prosedur dan aturan yang jelas tidak bisa disebut observasi.

“Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan” (Soehartono, 1998:69).

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan. “Wawancara tak terstruktur sering disebut wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya).

Sedangkan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi tapi juga artikel-artikel di majalah Gema Perjuangan, risalah rapat, notulensi rapat, dan lain-lain.

Studi pustaka, yaitu dengan melakukan kajian terhadap buku, literatur, Peraturan perundang-undangan dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Studi lapangan, yaitu penulis mengadakan penelitian secara langsung dilokasi yang telah ditetapkan yaitu di Desa Basaan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, melalui : wawancara, observasi. “Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder)” (Soehartono, 1998: 67). Adapun pengertian observasi itu adalah, sebagai berikut: “Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan” (Soehartono, 1998:69).
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang didapat dari: Literatur, dokumen-dokumen, Surat Keputusan, Majalah Gema Perjuangan, Surat Kabar.

D. Informan

Informan dipilih secara purposive sampling yaitu di mana penulis mengambil informan berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang akan dijadikan sebagai anggota informan adalah:

1. Kepala Desa
2. Pengurus Kelompok Tani
3. Tokoh dan masyarakat

E. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka hal ini disebabkan karena data berupa data kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Dalam menganalisis data yang sudah ada, penulis menggunakan teknik metode kualitatif dengan interpretasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat. Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ditunjukkan dengan kurang aksesnya mereka terhadap beberapa fasilitas, misalnya informasi, teknologi, permodalan usaha, hukum, dan apalagi kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses tersebut diawali dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat terutama di pedesaan.

Beragam strategi yang teruraikan dalam kegiatan dapat dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan potensi diri dalam rangka meningkatkan dan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan kapasitas masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dapat

diupayakan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada di masyarakat setempat.

1. Peningkatan Mutu dan Kuantitas Pendidikan Formal dan Non Formal

Peningkatan pendidikan merupakan suatu usaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Pendidikan tidak selalu harus bernuansa formal, tetapi dapat juga dituangkan sebagai pendekatan pendidikan non formal. Misalnya melalui pelatihan, praktek lapangan, magang, studi banding, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat dibidang peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah desa Basaan I sesuai dengan hasil wawancara dengan informan salah satu tokoh masyarakat sekaligus petani yang ada di desa Basaan I, disebutkan bahwa:

“Sampai dengan sejauh ini, motivasi, dan himbauan yang diberikan pada pemerintah desa belum mampu memberikan kesadaran pada sebagian besar masyarakat bahwa pendidikan merupakan unsur yang vital dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memberdayakan dirinya. Nampaknya pemerintah desa belum terlalu serius memperhatikan pemberdayaan masyarakat petani, karena apabila diamati lebih jauh lagi, rata-rata anak petani yang ada di desa ini sudah merasa cukup puas apabila sudah mampu menyekolahkan anak mereka pada jenjang SMP, peran pemerintah desa juga terkesan belum maksimal memberdayakan mereka yang masih usia sekolah, maupun yang sudah putus sekolah”.

menjadi perhatian utama dari pemerintah desa.

2. Peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan

Penyuluhan adalah salah satu dari contoh pendidikan non formal yang pembahasannya sangat fleksibel (d disesuaikan dengan kebutuhan sasaran), penyuluhan diterapkan dengan sistem pendidikan orang dewasa dengan sarasannya adalah orang-orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman di bidangnya.

Sejauh pengamatan peneliti, strategi peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan bagi masyarakat petani yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum dikembangkan, hal ini dapat dianalisa dari keterlibatan pemerintah desa untuk berperan menghadirkan petugas tenaga penyuluh pertanian dari pemerintah kabupaten, seperti yang diungkapkan oleh kepala desa basaan Bapak Eddi S. Tololiu yang mengatakan bahwa:

“petugas penyuluh lapangan khusus dibidang pertanian merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten, yang tugas pelaksanaannya menjadi kewajiban Dinas Pertanian, sebagai pemerintah desa sifatnya hanya menunggu jadwal kunjungan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian tersebut”.

3. Kegiatan Pendampingan

diperuntukkan guna pengembangan usahaproduktif masyarakat.

Strategi pemberdayaan dalam bidang pendampingan bagi masyarakat petani yang ada di desa basaan I belum nampak terlihat, bahkan dapat dikatakan hamper tidak pernah dilakukan, dari pihak pemerintah desa sendiri belum melakukan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPD Basaan I, sekaligus juga sebagai masyarakat petani, yang mengatakan:

“Belum pernah ada kegiatan pendampingan bagi para petani yang ada di desa ini, sebenarnya kegiatan pendampingan ini merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat petani, karena selama ini dan sebagian besar petani yang ada hanya mengandalkan insting alamiah mereka dalam melaksanakan kegiatan pertanian, sehingga hasil produksi terbilang biasa-biasa saja tanpa ada peningkatan yang berarti”

4. Penyebaran Informasi

Informasi dimaksud contohnya berkaitan dengan produk unggulan, sumber-sumber bahan baku, dan informasi pemasaran. Kedua adalah kelemahan masyarakat sendiri dalam mengakses informasi yang sebenarnya sudah tersedia di lingkungan mereka.

Hal ini dapat disebabkan oleh motivasi masyarakat yang rendah untuk mengakses informasi tersebut atau keterbatasan masyarakat karena buta huruf. Dalam kasus kedua ini pemberdayaan dapat diupayakan dengan kampanye pentingnya informasi bagi masyarakat. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh sekretaris desa adalah:

“Secara konkrit dari pihak pemerintah desa belum melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat petani yang ada di desa basaan I ini, hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di kantor desa, sehingga sebagai aparat desa masih merasa kesulitan untuk dapat mengakses informasi tersebut”.

5. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

a. Penumbuhan kelompok produksi masyarakat

Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk menggabungkan potensi ekonomidan berbagai sumberdaya masyarakat yang akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai fasilitas untuk pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Pembentukan kelompok juga ditujukan untuk meningkatkan “bargaining position” dalam berbagai kepentingan misalnya untuk efisiensi produksi dan meningkatkan daya pemasaran produk.

Strategi ini oleh pemerintah desa basaan belum pernah dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat petani, yang mengatakan:

“dari dulu sampai dengan sekarang kelompok tani yang ada di desa basaan ini hanya ada satu, tidak mengalami perkembangan, kelompok tani tersebut dari dulu sampai sekarang hanya begitu-begitu saja, pemerintah desa sepertinya kurang untuk memprakarsai pembentukan organisasi desa seperti kelompok tani. Paling banyak masyarakat petani yang ada di desa basaan ini melakukan profesinya sebagai petani hanyalah individu-individu petani itu sendiri”.

b. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan mengembangkandan menguatkan koperasi-koperasi yang sudah ada atau menumbuhkan yang belum ada tetapi potensial untuk dimunculkan (contohnya; pengembangan kelompok tani menjadi koperasi tani). Pengembangan dan penguatan basis koperasi Pengembangan dan penguatan koperasi/KUD memerlukan ragam program aksi yang mencakup aspek penerapan prinsip-prinsip perkoperasian, pengembangan organisasi dan manajemen perkoperasian, pengembangan usaha dan permodalan, dan pembinaan perkoperasian.

1. Penerapan prinsip-prinsip perkoperasian, yaitu Menumbuhkan kemandirian koperasi dengan mengurangi intervensi pemerintah (ulur tangan) Memfungsikan rapat anggota sebagai sarana keputusan usaha.
2. Meningkatkan wawasan dan pemahaman pembina, anggota dan masyarakat, sehingga prinsip dan semangat serta jiwa berkoperasi dapat diterapkan secara serius dan konsekuen Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat luas (anak-dewasa) dalam bentuk advokasi perkoperasian yang kontinyu. Konsultasi perkoperasian bagi pengurus, pengelola dan seluruh anggota koperasi.

Informasi yang diberikan oleh kepala desa Basaan Satu Bapak Eddi S. Tololiu menyebutkan bahwa:

“Selama ini partisipasi petani dalam mengikuti program-program pemberdayaan masih sangat kurang, saya menilai kurangnya partisipasi masyarakat petani ini lebih dilandasi oleh sikap apatis mereka, karena mereka menganggap bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan tidak terlalu membawa manfaat yang berarti, selaku pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menumbuhkan, meningkatkan partisipasi masyarakat petani ini, namun belum juga belum dapat mencapai hasil yang baik, mungkin hal ini merupakan dampak traumatis dari sebagian besar masyarakat petani yang ada karena pernah ada kegiatan PNPM yaitu pengembangan bibit varietas baru, namun tidak membawa hasil, sehingga petani merasa dirugikan dengan mengikuti program

tersebut, yang seharusnya mereka dapat memproduksi hasil seperti biasanya, namun ini tidak dapat karena kegagalan yang dialami oleh masyarakat petani yang ada”.

B. Pembahasan

Strategi pemberdayaan masyarakat petani yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa Basaan Satu dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, sebagian besar petani tidak atau kurang tertarik pada proses diskusi dan muatan media yang membosankan. Sesungguhnya ada beberapa strategi yang dapat diaplikasikan supaya proses diskusi-konsultasi dan media dapat menarik minat mereka terhadap program pemberdayaan.

1. Memilih inovasi tepat guna.

Inovasi yang akan diintroduksi ke dalam program pemberdayaan harus mempunyai banyak kesesuaian terhadap kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di petani. Untuk itu, inovasi yang ditawarkan ke petani harus inovasi yang tepat guna. Inovasi yang tepat guna harus dirasakan sebagai kebutuhan oleh petani kebanyakan; harus memberi keuntungan secara konkrit bagi petani; harus mempunyai kompatibilitas/keselarasan; harus dapat mengatasi faktor-faktor pembatas; harus mendayagunakan sumberdaya yang sudah ada; harus terjangkau oleh kemampuan finansial petani; harus sederhana tidak rumit dan mudah dicoba; dan harus mudah untuk diamati.

2. Memilih metode penyuluhan yang efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi percepatan adopsi dan difusi inovasi adalah tepat tidaknya dalam menggunakan metode penyuluhan. Penggunaan metode yang efektif akan mempermudah untuk dipahami oleh petani. Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan di luar sekolah (informal) yang diberikan kepada petani dan keluarganya dengan maksud agar mereka mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan keluarganya atau bila memungkinkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekelilingnya.

3. Pemberdayaan Petugas Penyuluh

Agen penyuluhan merupakan individu atau institusi yang mempunyai tugas pokok memberikan pendidikan informal kepada petani dan keluarganya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahatani dengan maksud agar mereka mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan keluarganya atau bila memungkinkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekelilingnya.

4. Kaderisasi Petani Penyuluh

Lima golongan, yaitu inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Kelima golongan petani tersebut, masing-masing mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Inovator, mempunyai ciri-ciri; aktif mencari inovasi, berani mengambil risiko, berpendidikan cukup baik, relatif berusia muda, mobilitas sosial cukup tinggi, memiliki pendapatan di atas rata-rata, perintis pemula dalam adopsi inovasi.
- b. Early adopter, mempunyai ciri-ciri; merupakan opinion leader, berani mengambil risiko, berpendidikan cukup baik, relatif berusia muda, mobilitas sosial cukup tinggi, memiliki pendapatan di atas rata-rata, suka mempraktikkan inovasi yang baru dikenalkan, merupakan golongan pembaharu.
- c. Early majority, mempunyai ciri-ciri; hati-hati dalam mengambil keputusan, mobilitas sosial kurang, berpendidikan rata-rata, usia relatif muda, akan mengadopsi setelah melihat bukti dari orang lain.
- d. Late Majority, mempunyai ciri-ciri; skeptis terhadap inovasi, usia relatif lebih tua, status sosial relatif rendah, mobilitas sosial rendah, mengadopsi lebih disebabkan perasaan segan, bukan karena penilaian positif terhadap inovasi.
- e. Laggard, mempunyai ciri-ciri; berorientasi lokal, berfikiran dogmatis, berorientasi pada masa lalu, dibutuhkan waktu lama untuk meyakinkan mereka agar mengadopsi inovasi, atau bahkan akan menolak selamanya.

5. Penguatan Kelembagaan Petani

Langkah-langkah pemberdayaan kelembagaan petani sebagai suatu upaya perubahan sosial diawali dengan tahap diagnostik. Dalam fase ini dilakukan diagnosa atau analisis situasi lintas-sektor, lintas disiplin, dan lintas aspek elemen-elemen perubahan sosial di suatu wilayah pembangunan. Dalam tahap ini kelompok perekayasa model pemberdayaan (ilmuwan dari berbagai disiplin keilmuan) merupakan aktor utama dalam proses identifikasi dan diagnosa masalah lapangan. Dalam fase ini, lembaga riset dan perguruan tinggi diposisikan sebagai think-tank dan lembaga pembinaan (penyuluhan) sedangkan lembaga perancangan pembangunan daerah berperan sebagai pemberi input.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat petani yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Basaan Satu belum dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum dapat meningkatkan hasil/produksi pertanian para petani, para petani masih menggunakan pengetahuan konvensional dalam mengelola lahan pertanian.
2. Strategi Pemerintah Desa Basaan Satu dalam pemberdayaan petani dapat dilihat melalui: peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan formal dan non formal para petani, peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan, kegiatan pendampingan, penyebaran informasi, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, belum sepenuhnya berhasil mengangkat para petani keluar dari ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh petani untuk membeli bibit, pupuk, pestisida dan keperluan produksi lainnya.
3. Para petani desa Basaan Satu terkesan kurang partisipatif mengikuti kegiatan/program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini disebabkan oleh sikap apatis para petani, karena faktor kekecewaan mereka mengikuti program pemberdayaan sejenisnya, dengan hasil produksi yang menurun, kerugian dibidang materi dimana modal untuk menanam tidak dapat terpenuhi lagi.

B. Saran

Saran penelitian ini berdasarkan hasil kesimpulan diatas adalah:

1. Pemerintah Desa Basaan Satu harus melahirkan inovasi baru dalam melakukan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat petani, sehingga dari hasil pemberdayaan tersebut berdampak pada peningkatan taraf hidup, kesejahteraan, dan hasil produksi pertanian para petani yang ada.
2. Strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Desa Basaan I kedepannya harus berdasarkan situasi dan kondisi yang riil terjadi pada masyarakat petani, seperti pemecahan masalah melalui strategi pemberdayaan untuk mengatasi kekurangan modal petani dalam membiayai produksi hasil pertanian mereka.
3. Pemerintah Desa Basaan Satu harus memberikan motivasi, pembinaan, sosialisasi, dan himbuan secara terus menerus kepada masyarakat petani, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga tujuan dari dilakukannya kegiatan pemberdayaan dapat berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Kenneth R. 2005. Konsep Strategi Perusahaan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hawadi, Reni Akbar, 2002. Identifikasi Keberbakatan Intelaktual, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Pristiwati, Yuni, 2005. Marajut Perubahan, Penerbit Persepsi, Jakarta.
- Poerwadaminta, W. JS.1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.

Poernomo, Mangku. 2004. *Pembaruan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*, Laper Pustaka utama. Yogyakarta.

Suharto, Edi. 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama.

Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Soehartono, Irawan. 1998, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soejito, S. 1987. *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, PT. Tiara Wacana: Jogjakarta.

Tampubolon, Mangatas. 2006, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.

Wahyu, 1989. *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*: Banjarmasin.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.